



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.D
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Terrestrial		
I.1.	Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Jaringan Pelayanan <i>Feeder</i> dan Pulau-Pulau	<ol style="list-style-type: none">a. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terrestrial yang menghubungkan PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKN Kupang, dan PKW Waingapub. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terrestrial yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumbac. memanfaatkan ruang untuk menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D - 2

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan dan melakukan kegiatan pengelolaan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian Kawasan Lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman</p>
II.	Jaringan Satelit		
II.1.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan	Jaringan Satelit	<p>a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, dan PKW Waingapu</p> <p>b. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D - 3

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit
II.2.	Jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni	Jaringan Satelit	a. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D - 4

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati